

Lampiran 1 : Riwayat Singkat Pemerintahan Karesidenan Surakarta

RIWAYAT SINGKAT PEMERINTAHAN KARESIDENAN
SURAKARTA.

RAHASIA.

Permulaan berdirinya Pemerintahan Karesidenan Surakarta dapat di-
anggap bermula pada saat lenjapnya Pemerintah Militer Djepang, sebab
pada waktu sebelumnya, pemerintahan di daerah Surakarta sepenuhnya dilak-
ukan oleh Pemerintah Kasunanan dan Pemerintah Mangkunegaran dibawah pe-
ngawasan Pemerintah Hindia-Belanda lalu diganti oleh Pemerintah Balaten-
tara Djepang.

Pada saat hapusnya Pemerintah Balatentara Djepang di Surakarta tim-
bulah hasrat mendirikan suatu Pemerintah daerah yang sesuai dengan ke-
hendak zaman ; disamping itu semakin keras terasas keinginan beberapa
golongan dari kalangan Rakjat untuk melikwidir sistim feodalisme, lebih
tegas Pemerintah Swapradja.

Sebagai kristallisatie dari kedua keinginan tersebut, berdirilah Pe-
merintah Karesidenan (sementara) Surakarta.

Satu dan lain tersimpul dengan lebih djelas dalam urut-urutan wak-
tu terdjadinja peristiwa-peristiwa penting bagi daerah Surakarta, sebagaimana
tertjantum dibawah ini :

15-8-1945. Negara Djepang menjerah kalah kepada Negeri-2 Sekutu.
Sesudah proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia,
di Surakarta dan di Kabupaten-Pnja mulai didirikan Komite
Nasional Daerah.

30-9-1945. Komite Nasional Pusat daerah Surakarta dibawah pimpinan
Mr. Soemodiningrat, memaksa Kepala daerah Surakarta (Kee-
cha Zimu Kyoku Chokan) H. Watanabe menjerahkan kekuasaannya
kepada Komite Nasional Pusat daerah.

1-10-1945. Pemerintahan daerah Surakarta dipegang oleh suatu delegasi
dari Komite Nasional Pusat daerah, suatu "Putjuk Pimpinan"
, terdiri dari tuan-tuan : SOEPRAPTO, Ketua Pengadilan Ne-
geri Surakarta, almarhum SOETOPO, Kepala Sekolah Guru dan
SOEMANTRI, Kepala Kantor Tera.

19-10-1945. Pemerintah Pusat R.I. mengangkat R.P. SOEROSO sebagai Ko-
misaris Tinggi untuk daerah-2 Surakarta dan Jogjakarta.
Sementara itu Komite Nasional Pusat daerah mengalami
reorganisasi.

1-11-1945. Pemerintah daerah beralih dari tangan "Putjuk Pimpinan"
ke suatu Directorium, yang ditundjuk oleh Komite Nasional
Pusat daerah baru dan terdiri dari :

1. Mr. Moh. Daljono.
2. Dasceki, 3. Prodjoscedodo, 4. Ronomasono, 5. Djoewardi

Dalam pada itu Komisaris Tinggi mulai dengan ussahanya
mengatur Pemerintah daerah Surakarta. Dengan suatu maklu-
mat beliau membentuk collegiaal bestuur terdiri dari :

Ketua : Komisaris Tinggi.

Anggauta-2 : Kedua Seri Paduka, 2 orang yang ditundjuk o-
leh kedua Seri Paduka, Directorium.

Berhubung dengan pihak Swapradja kurang mengerti akan
kehendak zaman, maka collegiaal bestuur ini tidak dapat
bekerdja sebagaimana musti.

Disamping itu Komisaris Tinggi membentuk sebuah panitja
yang berkewadajiban menjusun suatu rentjana undang-undang
dasar yang progressief bagi kedua Swapradja.
Rentjana ini telah selesai dan dikirimkan ke Kementerian
Dalam Negeri di "Purwokerto."

Controlerse antara pihak pro-Swapradja dan anti
Swapradja semakin menghebat ; pembesar-2 Swapradja, a.l.
Papatih Dhaem Drs. Sosrodiningrat, di tjuli. Kantor cen-
tral bestuur Kasunanan (Kantor Kapatihan), begitu pula
daerah-2 Kabupaten, menjatakan melepaskan perhubungannya
dengan Pemerintah Kasunanan dan Mangkunegaran.

Sumber : Arsip KODAM VII Diponegoro, Jawa Tengah

Lampiran 1 : Riwayat Singkat Pemerintahan Karesidenan Surakarta

- 2 -

Dalam usahanya memecahkan soal Swapradja di daerah Surakarta, Menteri Dalam Negeri (Dr. Soedardono) memutuskan mengadakan plebisit di daerah tersebut. Sebuah panitia persiapan dan penyelenggaraan plebisit dibentuk, diketuai oleh Sdr. Soebadijo Sastroatomo, dan beranggota beberapa orang terkemuka dari golongan politik di daerah Surakarta; panitia ini sudah kandas dalam menjalankan langkahnya yang pertama karena sabot dari pihak anggotanya.

Kegentingan, ketegangan dan kekawatiran menjapai puncaknya.

+ medio Mei 1946. Pemerintah Pusat berpendapat bahwa Komisaris Tinggi R.P. Soeroso harus diganti oleh seorang "yang kuat" yang dapat menenteramkan daerah. Maka dari itu Gubernur Jawa Timur Pak Soerjo dipindahkan ke Surakarta dan sebagai pengganti beliau di Jawa-Timur ditunjuk R.P. Soeroso.

Salah satu maklumat yang penting dari Pak Soerjo ialah yang menetapkan bahwa para pegawai Kasunanan dan Mangkunegaran adalah pegawai Republik Indonesia.

1-6-1946 Pihak Tentara dibawah pimpinan Djendral Major Soetarto almarhum melakukan "staatsgreep" dan membentuk Pemerintah Tentara dan Rakjat yang terdiri dari :
1. Soetarto (Perwira Polisi Tentara), 2. Soediro mBah
3. Soejono, 4. Soediro (Banteng), 5. Soemodihardjo.
Gubernur Pak Soerio diangkat menjadi penasehat.

6-6-1946. Daerah Surakarta dinjatakan oleh P.J.M. Presiden dalam keadaan bahaja, disusul oleh seluruh Tanah Jawa. Buat daerah Surakarta harus dibentuk Dewan Pertahanan Daerah. Wakil Presiden Hatta sendiri datang ke Surakarta untuk membantu menenteramkan suasana.

Dewan Pertahanan Daerah Surakarta praktis sama susunannya dengan Dewan Pemerintah Rakjat dan Tentara.

15-7-1946. P.J.M. Presiden dalam suatu Penetapan Pemerintah tgl. 15-7-1946 No. 16/S.D. menetapkan bahwa :
a. jabatan Komisaris Tinggi dihapuskan.
b. daerah Surakarta untuk sementara waktu merupakan satu Karesidenan.
c. terbentuk suatu daerah baru dengan nama "Kota Surakarta".

Sebagai Kepala daerah Karesidenan Surakarta diangkat Mr. R.P. Iskaq Tjokrohadisoerjo, dan sebagai wakil-Residen Soediro (Banteng).

6-8-1946. Dengan Peraturan Pemerintah tg. 6-8-1946 No.8 ditetapkan pembentukan dan susunan Dewan Perwakilan Rakjat Karesidenan, Kabupaten dan Kota Surakarta. Dengan demikian lenjaplah "Dewan Pertahanan Daerah" yang lama dan dibentuk Dewan Pertahanan Daerah baru, yang susunannya sesuai dengan peraturan.

Residen Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo mulai dengan pekerjaan stabilisasi Pemerintahan daerah. Badan Perwakilan Rakjat daerah dengan Badan Executiefnya dibentuk untuk mengganti Komite Nasional daerah; Pemerintahan di Kabupaten diatur kembali. Roda Pemerintahan mulai berdjalan dengan teratur. Hal yang menonjol dari dasar hukum sedapat mungkin dikembalikan ke keadaan sebagaimana musti.

Sangat sekali persoonlijkheid dari Residen Mr. Iskaq kurang cukup simpatik bagi suatu daerah seperti Surakarta ataupun usaha-usahanya stabilisasi dan konsolidasi Pemerintahan dirasakan terlalu keras buat keadaan dan suasana yang terdapat pada waktu itu di daerah Karesidenan Surakarta: masih terlalu banyak terdapat anasir yang lebih banyak menghendaki kekawatiran dari pada keadaan yang teratur.

Fermsuahan terhadap dirinya dan Wakil Residen Soediro semakin menghebat dan akhirnya pada tanggal 9-11-1946.

Lampiran 1 : Riwayat Singkat Pemerintahan Karesidenan Surakarta

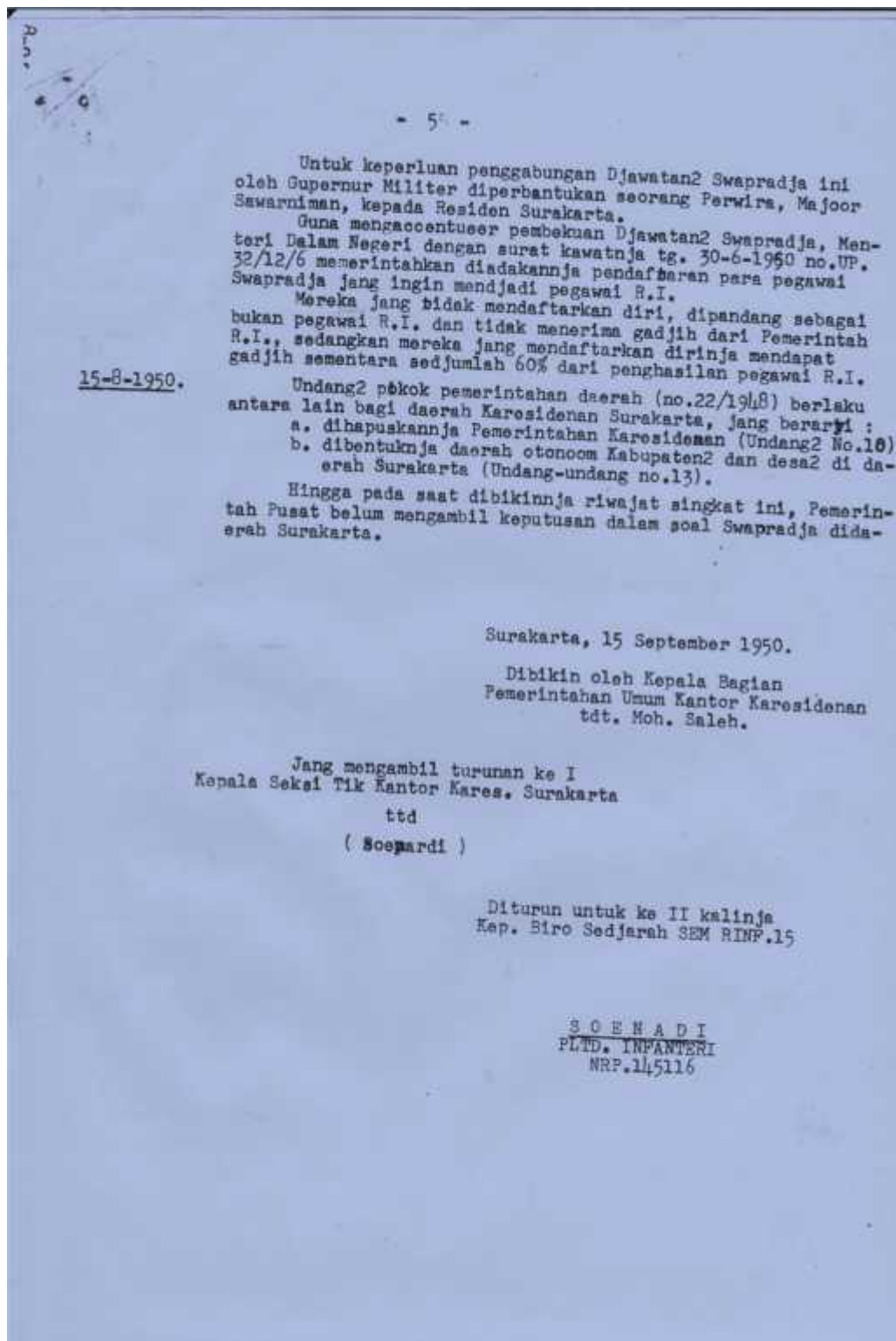
| | |
|-------------------|--|
| 9-11-1946. | <p style="text-align: center;">- 3 -</p> <p>Residen Mr. Iskaq dan Wakil-Residen Sudiro ditjuluk sedang mereka bekerdja dikantor Karesidenan, tetapi pada sore harinja mereka sudah di merdekakan kembali. Oleh fihak pentjuluk telah diangkat sebagai Residen seorang bernama Sojas (dalam kabinet Amir Sjarifudin mendjabat Menteri Urusan Makanan Rakjat) dan sebagai Wakil-Residen Dasuki (pernah mondjadi anggota Directorium daerah Surakarta), tetapi kedua-duanja tidak pernah melakukan tindakan pemerintahan, bahkan mereka hanya satu hara (hari pentjulikan) kelihatan dikantor Karesidenan.</p> |
| 6-12-1946 | <p>Pemerintah Pusat menganggap perlu bahwa Residen Mr. Iskaq dan Wakil-Residen Sudiro untuk sementara waktu tidak mendjalkan lagi kewadjabannja; dalam masa itu pemerintahan daerah dipimpin oleh Badan Executief Karesidenan. Keadaan ini berlangsung hingga pada tanggal</p> <p>Pemerintah mengangkat Supernur M. Soetardjo Kartohadikoesomo sebagai Kepala Daerah Karesidenan Surakarta, sedang Wakil-Residen Sudiro kembali bekerdja lagi.</p> <p>Umum memandang banyak harapan bahwa seorang yang berpengalaman sebagai Supernur Soetardjo akan berhatsil memperbaiki keadaan: tetapi tidak lama kemudian suara2 yang menjatakan tidak setuju dengan sikapnja semakin keras terdengar. Beliau dituduh terlalu tjondong kepada fihak Swapradja ataupun neo-feodalisme. (Peristiwa yang menggemparkan ialah sidang Badan Perwakilan Rakjat Karesidenan pada tg. 17-2-1947. Halaman Kantor Karesidenan (Kantor Kepatihan dahulu) yang begitu luas penuh dihiasi dengan bendera rontek dan bendera umbul-umbul, yaitu bendera2 yang menghiasi halaman Kraton dan aloon2 jika ada perajaan sedangkan gamelan membunjang lagu2 sebagaimana biasa didengarkan pada upatjara2 di Kraton. Sidang sebagian besar terdiri dari serangan2 yang ditudjukan kepada diri Pak Soetardjo).</p> <p>Selain dari pada itu Pemerintah tidak menjetudjui beleid yang dilakukannja. Pak Soetardjo berpendirian: oleh karena daerah Karesidenan Surakarta itu warisan dari daerah Swapradja Kasunanan dan Mangkunegaran yang sudah lama volwaardig otonoom maka sudah selajaknja daerah Karesidenan Surakarta mempunyai hak otonoom dan beliau menjusuh rentjana undang2 pembentukan daerah otonoom Surakarta yang ditawarkan kepada Badan Perwakilan Rakjat pada sidangnya tg. 17-2-1947 yang menggemparkan itu. Sidang menolak idee otonomi ini dengan alasan belum waktunya. Berhubung dengan perselisihan faham antara Pemerintah dan Supernur Pak Soetardjo ini maka beliau pada tanggal</p> |
| 21-3-1947 | <p>dibebaskan dari kewadjabannja sebagai Kepala Daerah Karesidenan dan Wakil-Residen Sudiro ditundjuk sebagai Kepala Daerah Karesidenan.</p> |
| Madio Djuli 1947. | <p>Wakil-Residen Sudiro diangkat mondjadi Residen, Kepala daerah Karesidenan Surakarta.</p> <p>Keadaan di daerah Karesidenan Surakarta mondjadi bertambah sulit disebabkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> tindakan2 anarhistis dari badan2 perdjongan yang di daerah ini memang bersifat istimewa (penggedoran meradjalela), kemudian ditambah dengan adanya Tentara Hidjrah dari Djawa-Besar. semakin buruknja keadaan perekonomian (uang ORI semakin merosot nilainja). akibat2 dari actie militer Belanda ke I (mulai tg. 21-7-1947 Pemerintah Kabupaten, Karesidenan, Badan Perwakilan Rakjat, Badan Executief dan Dewan Pertahanan Daerah bekerdja sekut tenaga untuk mengatasi kesulitan2. |
| 23-3-1948 | <p>Tentara Peladjar dibawah pimpinan ACHMADI mengadakan pembersihan dikalangan nagat2.</p> |

Lampiran 1 : Riwayat Singkat Pemerintahan Karesidenan Surakarta

| | |
|-------------------|---|
| - 4 - | |
| <u>19-8-1948.</u> | Pasar Malam di Sriwedari dibakar, Permulaan dari actie fibak pengatjan2 jang mentjapai puntjaknja dengan pemberontakan P.K.I. Muso (Peristiwa Madiun). |
| <u>-9-1948.</u> | Tentara Siliwangi dibawah pimpinan Lt.Kol.Sadikin, pasukan mana berhidjrah di Surakarta, mulai beractie melawan pemberontak pengikut Muso. Pertempuran dimulai dari asrama Tentara Siliwangi di Srambatan (dekat setasiun Belapan), lalu beralih kearah selatan (kampung Kedawung), selandjutnja ke Sukohardjo, Tawangwari, Nguter, Wonogiri. |
| <u>18-9-1948</u> | Pemerintah mengangkat Gupernur Militer bagi daerah2 Surakarta, Semarang, Madiun dan Pati. Sebagai Gupernur Militer diangkat Kolonel GATOT SUBROTO, merangkap Pemimpin actie militer guna menindas pemberontakan Muso. Actie militer dilakukan oleh Lt.Kol.SADIKIN ds. |
| <u>19-12-1948</u> | Ber-puluh2 pegawai Negeri dari daerah Kares.Surakarta mendjadi korban pemberontakanini, a.l. Bupati Sukohardjo Suwarno Honggopati Tjitrohupojo, Patih Sukohardjo R.M.T.H. Hardjodiningrat, Wedono Sukohardjo Prodjosono, dan beberapa Assisten Wedana dan Wedana dari daerah Kabupaten Wonogiri. |
| <u>21-12-1948</u> | Actie militer Belanda ke II Jogjakarta diduduki. |
| <u>10-8-1949</u> | Tentara Belanda menduduki Kota Surakarta. Pemerintah Karesidenan meninggalkan kota Surakarta dan melandjutkan Pemerintahan R.I. di desa-desa. |
| <u>25-8-1949</u> | (Mengenai tindakan2 Pemerintah Mobil Karesidenan Surakarta ini akan disusun suatu verslag lengkap). |
| <u>1-11-1949</u> | Perintah pemberhentian tembak-menembak kepada Tentara RI dan Tentara Belanda. |
| <u>11-11-1949</u> | Pemerintah Karesidenan membuka kantor darurat di rumah Sdr. H.Soetadi di Kawatan (Kota Surakarta) dibagian Kota jang diduduki oleh T.M.I. (Bagian selatan). |
| <u>29-11-1949</u> | Kantor Karesidenan R.I. berpindah ke Kantor Karesidenan T.B.A. di Gladag (sebelah Timur). |
| <u>10-12-1949</u> | Persetudjuan antara Lt.Kol. Slamet Rijadi dan Kolonel J.H.M.U.L.E. Ohl tentang penjerahan daerah Karesidenan Surakarta sebagai daerah patroli. Tentara Belanda meninggalkan daerah Surakarta. |
| <u>1-12-1949</u> | Persetudjuan antara Residen R.I. Sudiro dan Residen Gelegeerd T.B.A., P.W.G. Linck tentang penjerahan Pemerintahan sipil, Pemerintah R.I. kembali berkuasa penuh di daerah Karesidenan Surakarta. |
| <u>20-12-1949</u> | Pelantikan Residen SALAMON sebagai Residen Surakarta baru; Residen SOEDIRO pindah ke Madiun. |
| <u>10-2-1950</u> | Gupernur Militer D.M.I. II membentuk Organisasi Pemerintahan Militer bagi daerah Kares. Surakarta dengan suratnja keputusan No. 019/Pnt/G.M.II/49.c.s. tgl. 1-12-1949. |
| <u>3-3-1950</u> | Kepala Staf Sipil (Residen) mengeluarkan perintah untuk menggabungkan Djawatan2 sipil R.I. dengan Djawatan2 sipil Witt non-Republik, terutama kantor2 Swapradja (Instruksi tg. 20-12-1949 No. 1/G.M.II/St.Civ./549). |
| <u>1-5-1950</u> | Berintah penggabungan disusul oleh Instruksi tg.10-2-1950 No. 2/G.M.II/St.Civ./50. |
| | Perintah Menteri Dalam Negeri untuk membeku Djawatan2 Kasunanan dan Mangkunegaran (surat tg. 3-3-1950 No.Fx.3/1/13). |
| | Penghapusan Pemerintah Militer bagi daerah Karesidenan Surakarta. |
| | Oleh karena dari fibak Swapradja kurang /tidak diberikan bantuan dan kerja-sama, terutama dari fibak Mangkunegaran. ma- |

Sumber : Arsip KODAM VII Diponegoro, Jawa Tengah

Lampiran 1 : Riwayat Singkat Pemerintahan Karesidenan Surakarta



Sumber : Arsip KODAM VII Diponegoro, Jawa Tengah